

BAGIAN ANGGARAN 000
(cantumkan kode Bagian Anggaran)



LAPORAN KEUANGAN
(NAMA ESELON I)
(NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)
(PERIODE SEMESTER/TAHUNAN)
TAHUN ANGGARAN 2XX1

(alamat eselon I)

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUNGAN ESELON I

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah eselon I dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika penyajian laporan keuangan eselon I:

- 1. Sampul Luar**
Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian laporan keuangan.
- 2. Sampul Dalam**
Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian laporan keuangan.
- 3. Kata Pengantar**
Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.
- 4. Daftar Isi**
Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.
- 5. Daftar Tabel**
Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.
- 6. Daftar Grafik**
Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.
- 7. Daftar Lampiran**
Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.
- 8. Daftar Singkatan**
Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Eselon I yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan eselon I setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sbb :

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

11. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Keuangan Eselon I.

15. Lampiran Laporan Keuangan

- a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
 - i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
 - ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
 - iii) Neraca Percobaan
(daftar laporan lihat lampiran III)
- b. Laporan barang pengguna
 - i) Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan
 - ii) Laporan Kondisi Barang (*khusus LKKL Tahunan*)
 - iii) Rincian Saldo Awal
(daftar laporan lihat lampiran III)
- c. Laporan Keuangan BLU
- d. Laporan Rekening Pemerintah
- e. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK
- f. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan

- a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan Eselon I dll.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN (*sebutkan nomor dan tahun*) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (*sebutkan tahun*), Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

(*Nama Kementerian Negara/Lembaga*) adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan (*Nama Kementerian Negara/Lembaga*) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor (*sesuaikan dengan nomornya*) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan *Semester I/Tahunan* ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan *pembiayaan*. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (*periode laporan*) adalah sebesar (*Rp...*), atau ... persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA ... Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar (*Rp...*), atau ... persen dari yang dianggarkan dalam DIPA...
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga (*sebutkan periode laporan*). Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar (*Rp...*) dan Kewajiban sebesar (*Rp...*), sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kementeriannegara/lembaga <*Nama Kementerian Negara/Lembaga*> per (*sebutkan periode laporan*) adalah sebesar Rp...

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
4. Laporan keuangan (*sebutkan periode laporan*) ini berstatus sebagai laporan keuangan yang belum/sudah diperiksa (*unaudited/audited*).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan (*sebutkan periode laporan*) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

<Nama Kota>, <tanggal, bulan dan tahun>

<Jabatan penanda tangan>

<Nama penanda tangan>

NIP ...

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	...
Daftar Isi	...
Daftar Tabel	...
Daftar Grafik	...
Daftar Lampiran	...
Daftar Singkatan	...
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	...
Pernyataan Tanggung Jawab	...
I. Ringkasan	...
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA perbandingan 2XX1 dan 2XX0)	...
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2XX1 dan 2XX0)	...
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	...
A. Penjelasan Umum	...
A.1. Dasar Hukum	...
A.2. Kebijakan Teknis Eselon I	...
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	...
A.4. Kebijakan Akuntansi	...
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	...
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	...
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	...
B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	...
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	...
C.1. Posisi Keuangan Secara Umum	...
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	...
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	...
Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2008	...
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	...
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	...
• Neraca Percobaan	...
Laporan Barang Pengguna	...
• Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan	...
• Laporan Kondisi Barang	...
Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU	...
Lampiran Laporan Rekening Pemerintah	...
Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK	...

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

		Hal.
	Pendapatan Negara dan Hibah	Hal.
Catatan B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	...
Catatan B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	...
Catatan B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	...
Catatan B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	...
Catatan B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	...
Catatan B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	...
Catatan B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	...
Catatan B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	...
Catatan B.2.1.3	Penerimaan Hibah	...
	Belanja Negara	
Catatan B.2.2	Belanja Negara	...
Catatan B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	...

NERACA

ASET

	Aset Lancar	
Catatan C.2.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	...
Catatan C.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan	...
Catatan C.2.3	Kas pada Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.4	Piutang Pajak	...
Catatan C.2.5	Piutang Bukan Pajak	...
Catatan C.2.6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	...
Catatan C.2.7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	...
Catatan C.2.8	Uang muka belanja	...
Catatan C.2.9	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.10	Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.11	Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.12	Piutang Lainnya	...
Catatan C.2.13	Persediaan	...
Catatan C.2.14	Persediaan Badan Layanan Umum	...
	Investasi Jangka Panjang	
Catatan C.2.15	Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.16	Investasi Permanen Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.18	Aset Tetap	...
Catatan C.2.19	Aset Lainnya	...

KEWAJIBAN

	Kewajiban Jangka Pendek	...
Catatan C.2.20	Utang kepada Pihak Ketiga	...
Catatan C.2.21	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	...
Catatan C.2.22	Uang Muka dari Rekening Khusus	...
Catatan C.2.23	Uang Muka dari BUN	...
Catatan C.2.24	Uang Muka dari KPKN	...
Catatan C.2.25	Pendapatan yang Ditangguhkan	...
Catatan C.2.27	Utang Jangka Pendek Lainnya	...

EKUITAS

Catatan C.2.28	Cadangan Piutang	...
	Cadangan Persediaan	...
	Ekuitas Dana Lancar	
Catatan C.2.29	Dana Lancar Lainnya	...
Catatan C.2.30	Cadangan Piutang	...
Catatan C.2.31	Cadangan Persediaan	...
Catatan C.2.32	Pendapatan yang Ditangguhkan	...
Catatan C.2.33	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	...
	Ekuitas Dana Investasi	
Catatan C.2.34	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	...
Catatan C.2.35	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	...
Catatan C.2.36	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	...
Catatan C.2.37	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	...

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
(SEKJEN/IRJEN/DIRJEN/KEPALA <NAMA ESELON I>)

Laporan Keuangan (**Nama Eselon I**) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2XX1 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tanggal-bulan-tahun>
Sekjen/Irjen/Dirjen/Kepala Badan

(.....)

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan <Nama Eselon I> Tahun 2XX1 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan <Nama Eselon I> Tahun 2XX1 ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah <Nama Eselon I> dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2XX1 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari s.d. 30 Juni 2XX1 atau 1 Januari s.d. 31 Desember 2XX1).

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2XX1 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp... atau mencapai ... persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp... atau mencapai ... persen dari anggaran serta Penerimaan Hibah sebesar Rp... atau mencapai ... persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2XX1 adalah sebesar Rp... atau mencapai ... persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp... atau ... persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp... atau ... persen dari anggarannya, dan Belanja Hibah sebesar Rp... atau ... persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2XX1 dan 2XX0 dapat disajikan sebagai berikut:

	(dalam rupiah)			
	TA 2XX1		TA 2XX0	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah
Belanja Rupiah Murni
Belanja Pinjaman Luar Negeri
Belanja Hibah
JUMLAH

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Selain yang dianggarkan dalam DIPA, terdapat Penerimaan Hibah yang belum dianggarkan dalam DIPA TA 2XX1 sebesar Rp...

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp... yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp..., Aset Tetap sebesar Rp... dan Aset Lainnya sebesar Rp...

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp... yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp... yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp... dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp...

Ringkasan Neraca per *30 Juni 2XX1/31 Desember 2XX1** dan *(30 Juni 2XX0/31 Desember 2XX0*)* dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	(30 Juni/31 Desember) 2XX1	(30 Juni/31 Desember) 2XX0	Nilai kenaikan/ (penurunan)
Aset			
Aset Lancar
Aset Tetap
Aset Lainnya
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek
Ekuitas Dana			
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

*) Pilih salah satu

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Contoh :

<Menjelaskan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan LRA dan Neraca namun mempengaruhi Laporan Keuangan, misalnya reorganisasi, force majeure, sengketa peradilan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Kementerian Negara/Lembaga>.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/PB/ tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS <NAMA ESELON I>

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS <NAMA ESELON I>

(Diisi dengan rencana strategis eselon I)

Pendapatan

PENDAPATAN <NAMA ESELON I>

(Diisi dengan nilai realisasi pendapatan dan diuraikan per jenis pendapatan: pendapatan pajak (khusus Departemen Keuangan), pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah. Nilai realisasi pendapatan dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Uraikan juga penyebab kenaikan/penurunan realisasi pendapatan tersebut)

Belanja

BELANJA <NAMA ESELON I>

(Diisi dengan nilai realisasi belanja dan diuraikan per jenis belanja: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja Bantuan Sosial. Nilai realisasi belanja dibandingkan dengan nilai realisasi belanja periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Uraikan juga penyebab kenaikan/penurunan realisasi belanja tersebut. Uraikan juga program (dalam tabel) yang dilaksanakan oleh Eselon I, realisasi belanja program tersebut dan capaiannya)

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan <Nama Eselon I> Tahun 2XX1 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

<Nama Eselon I> termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah <Nama Eselon I> seperti kantor wilayah dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan <Nama Eselon I> disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja <Nama Eselon I>

Kementerian Negara/Lembaga <Nama Eselon I> Tahun 2XX1 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp... meliputi:

- Satuan kerja pusat/KP (*termasuk satker BLU jika ada*) sebesar Rp...
- Satuan kerja daerah/KD (*termasuk satker BLU jika ada*) sebesar Rp...
- Satuan kerja dekonsentrasi/DK sebesar Rp...
- Satuan kerja tugas pembantuan/TP sebesar Rp...

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	JENIS SUMBER DANA	
		APBN	BLU
20X0			
20X1			

Jumlah satuan kerja di lingkup <Nama Eselon I> adalah ... satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah ... satker (...%) sedangkan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sejumlah ... satker (...%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel I

Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Wilayah

No	Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1											
2											
3											
4											
5											
Jumlah											

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

TM = Tidak menyampaikan LK

Selain memperoleh dana dari DIPA BA..., juga mengelola dana yang berasal dari BA 062 (Subsidi dan Transfer) sebesar Rp... dan BA 069 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp..., [<dilampirkan daftar lengkap satuan kerja pengguna dana dari masing-masing BA> *\)](#)

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah [<Nama Eselon I>](#) Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah [<Nama Eselon I>](#) dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini [telah/belum](#) seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja di lingkup [<Nama Eselon I>](#) adalah satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah ... satker (...%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah ... satker (...%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Wilayah

No	Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1											
2											
3											

*) Laporan Keuangan atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA 062 dan BA 069) disajikan dalam laporan keuangan tersendiri, terpisah dari LK ini.

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi ^{*)}**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi

**) jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Eselon I per 31 Desember 2XX1 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Eselon I yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Ekuitas Dana (5) **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

<Menjelaskan realisasi anggaran pada TA 2XX1 dengan menyebutkan jumlah rupiah realisasi dan persentase dari anggarannya, yang terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
 - a. Penerimaan Perpajakan (khusus Departemen Keuangan)
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - c. Penerimaan Hibah

2. Realisasi Belanja Negara
 - a. Belanja Rupiah Murni
 - b. Belanja Pinjaman Luar Negeri
 - c. Belanja Rupiah Pendamping
 - d. Belanja Hibah
 - e. Belanja PNBPN
 - f. Belanja BLU>

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	Rp 1	Rp 1	100.00%
	-Penerimaan Pajak	Rp 1	Rp 1	100.00%
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 1	Rp 1	100.00%
	-Penrimaan hibah	Rp 1	Rp 1	100.00%
2	Realisasi Belanja Negara	Rp 1	Rp 1	100.00%
	- Belanja Rupiah Murni	Rp 1	Rp 1	100.00%
	- Belanja Pinjaman LN	Rp 1	Rp 1	100.00%
	- Belanja Rupiah Pendamping	Rp 1	Rp 1	100.00%
	- Belanja Hibah	Rp 1	Rp 1	100.00%
	- Belanja PNBPN	Rp 1	Rp 1	100.00%
	- Belanja BLU	Rp 1	Rp 1	100.00%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

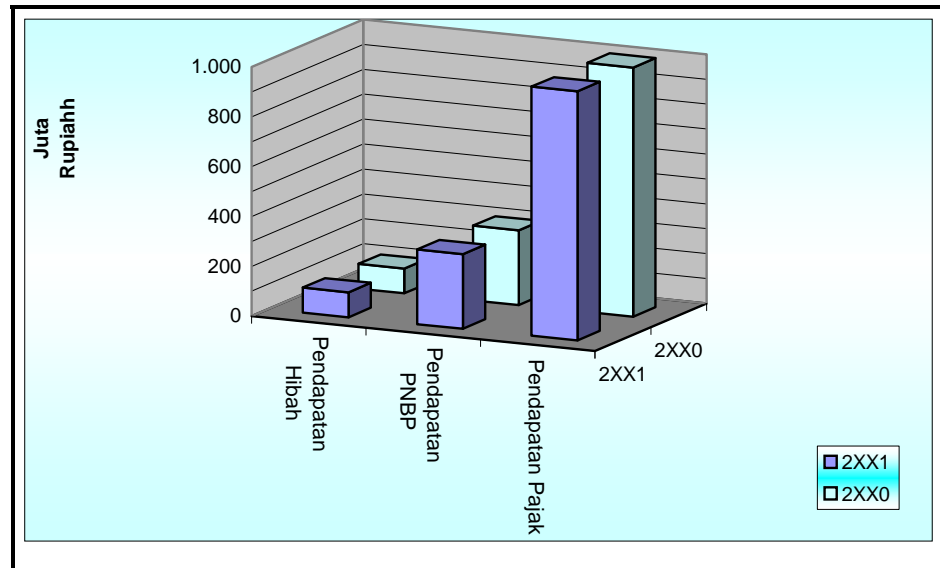
<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase realisasi Pendapatan Negara dan Hibah terhadap anggaran Negara dan Hibah TA 2XX1, beserta grafik komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah>.

Contoh Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2XX1 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah Rp...*

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan



Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2001

*Realisasi
 Penerimaan
 Perpajakan Rp...*

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan (khusus Departemen Keuangan)

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2001 Realisasi Penerimaan perpajakan juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan.

Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional>.

*Realisasi
 Penerimaan
 Pajak Dalam
 Negeri Rp...*

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri (khusus Departemen Keuangan)

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2001 Realisasi Pajak Dalam Negeri juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini juga dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:

Uraian	30 Juni/31 Des 2001	30 Juni/31 Des 2000	% Naik/(Turun)
PPh Nonmigas	Rp -	Rp -	-
PPh Migas	Rp -	Rp -	-
PPN dan PPn BM	Rp -	Rp -	-
PBB	Rp -	Rp -	-
BPHTB	Rp -	Rp -	-
Cukai	Rp -	Rp -	-
Pajak Lainnya	Rp -	Rp -	-
Total	Rp -	Rp -	-

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Realisasi Pajak
 Perdagangan
 Internasional
 Rp...

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional (khusus Departemen Keuangan)

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA realisasi Pajak Perdagangan Internasional TA 2XX1 Realisasi Pajak Perdagangan Internasional juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan>.

Besarnya realisasi Pajak Perdagangan Internasional dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:

Uraian	30 Juni/31 Des 2XX1	30 Juni/31 Des 2XX0	% Naik/(Turun)
Bea Masuk	Rp	Rp	-
Pajak/Pungutan Ekspor	Rp	Rp	-
Total	Rp	Rp	-

Realisasi PNB
 Rp...

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2XX1. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan.

Realisasi PNB berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNB Lainnya>.

Realisasi
 Penerimaan
 SDA Rp...

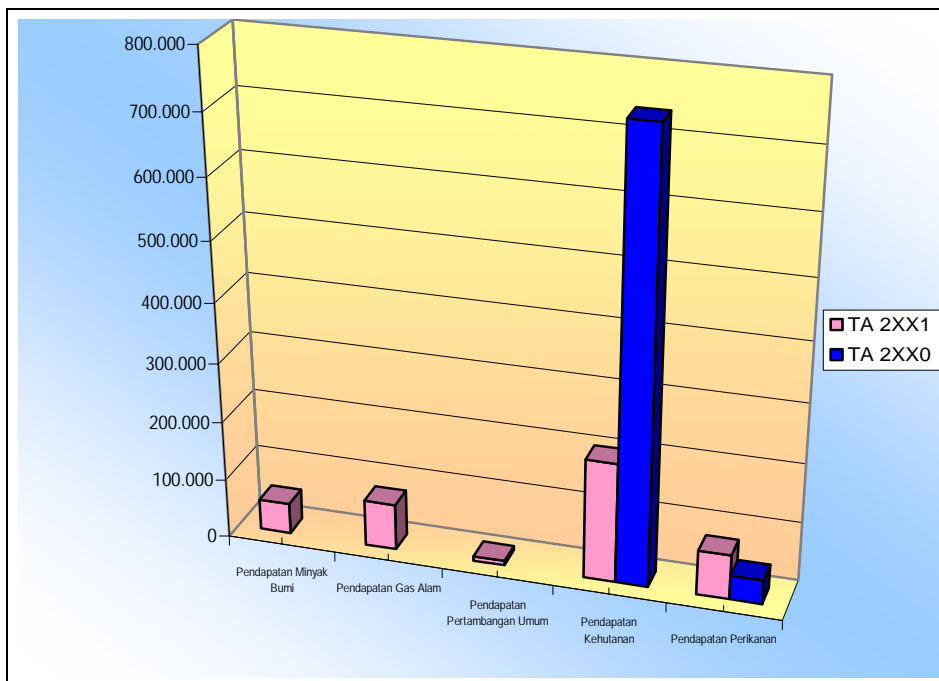
B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2XX1. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Besarnya realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam dirinci dalam tabel dan grafik seperti contoh di bawah ini:

Uraian	30 Juni/31 Des 2XX1	30 Juni/31 Des 2XX0	% Naik/(Turun)
Pendapatan Minyak Bumi	Rp	Rp	-
Pendapatan Gas Alam	Rp	Rp	-
Pendapatan Pertambangan Umum	Rp	Rp	-
Pendapatan Kehutanan	Rp	Rp	-
Pendapatan Perikanan	Rp	Rp	-
Total	Rp	Rp	-

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)



Grafik: Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2XX1

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp...

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (khusus Departemen Keuangan)

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2XX1. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Realisasi PNBP Lainnya Rp...

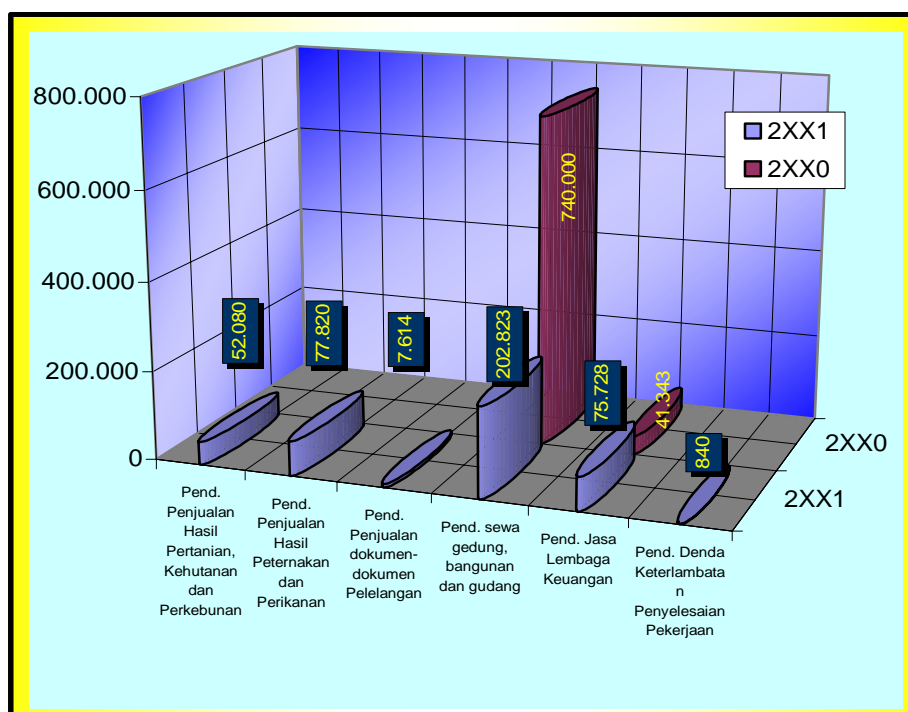
B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2XX1. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Uraian	30 Juni/31 Des 2XX1	30 Juni/31 Des 2XX0	% Naik/Turun
Pend. Penjualan Hasil Pertanian, kehutanan dan Perkebunan	Rp -	Rp -	-
Perikanan	Rp -	Rp -	-
Pelelangan	Rp -	Rp -	-
gudang	Rp -	Rp -	-
Giro)	Rp -	Rp -	-
Pend. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp -	Rp -	-



Grafik: Komposisi Realisasi Penerimaan PNPB TA 2XX1

Realisasi Penerimaan Hibah Rp...

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Penerimaan Hibah TA 2XX1. Realisasi Penerimaan Hibah juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Jelaskan juga penerimaan hibah yang belum terdapat di dalam DIPA TA 2XX1, baik untuk hibah yang berupa uang maupun berupa **barang**.
 (Rincian realisasi pendapatan hibah dapat dilihat pada lampiran...)

Realisasi Belanja Negara Rp...

B.2.2. Belanja Negara

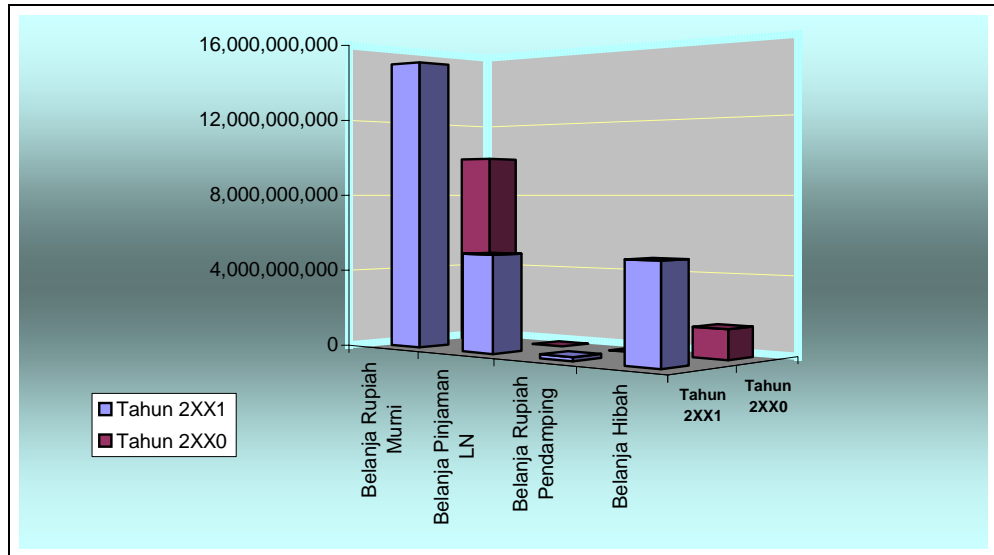
<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Negara TA 2XX1. Realisasi Belanja Negara juga

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri (iii) Belanja Hibah (iv) Rupiah Murni Pendamping (v) Penerimaan Negara Bukan Pajak (vi) Badan Layanan Umum.

Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:



Grafik : Komposisi Alokasi Belanja TA 2XX1

Realisasi Belanja
Rp...

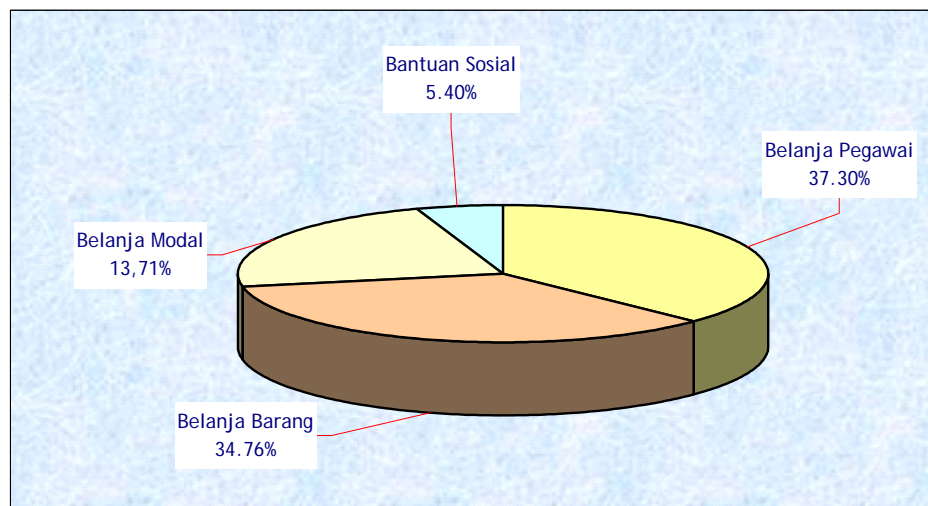
B.2.2.1. Belanja

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA 2XX1. Realisasi Belanja juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja



Grafik: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2XX1

Belanja Pegawai Rp...

Belanja Pegawai

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Pegawai TA 2XX1. Realisasi Belanja Pegawai juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni/31 Des 2XX1	30 Juni/31 Des 2XX0	% Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp -	Rp -	-
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	Rp -	Rp -	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	Rp -	Rp -	-
Belanja Pegawai Perjan	Rp -	Rp -	-
Belanja Gaji Dokter PTT	Rp -	Rp -	-
Belanja Honorarium	Rp -	Rp -	-
Belanja Lembur	Rp -	Rp -	-
Belanja Vakasi	Rp -	Rp -	-
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	Rp -	Rp -	-
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	Rp -	Rp -	-
Belanja Asuransi Kesehatan	Rp -	Rp -	-
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	Rp -	Rp -	-
Total	Rp -	Rp -	-

Belanja Barang Rp...

Belanja Barang

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Barang TA 2XX1. Realisasi Belanja Barang juga

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni/31 Des 2XX1	30 Juni/31 Des 2XX0	% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	Rp -	Rp -	-
Belanja Barang Non Operasional	Rp -	Rp -	-
Belanja Jasa	Rp -	Rp -	-
Belanja Pemeliharaan	Rp -	Rp -	-
Belanja Perjalanan	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp -	Rp -	-

*Belanja Modal
Rp...*

Belanja Modal

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Modal TA 2XX1. Realisasi Belanja Modal juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni/31 Des 2XX1	30 Juni/31 Des 2XX0	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp -	Rp -	-

*Pembayaran
Bunga Utang
Rp...*

Pembayaran Bunga Utang (khusus Bagian Anggaran 061)

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Bunga Utang TA 2XX1. Realisasi Belanja Bunga Utang juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

Rincian realisasi Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni/31 Des 2XX1	30 Juni/31 Des 2XX0	% Naik/(Turun)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek	Rp -	Rp -	-
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang	Rp -	Rp -	-
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek	Rp -	Rp -	-
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang	Rp -	Rp -	-
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara DN	Rp -	Rp -	-
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara LN	Rp -	Rp -	-
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp -	Rp -	-

Belanja Bantuan Sosial Rp...

Belanja Bantuan Sosial

<Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Bantuan Sosial TA ... Realisasi Belanja Bantuan Sosial juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu dengan menjelaskan terjadinya kenaikan/penurunan>.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni/31 Des 2XX1	30 Juni/31 Des 2XX0	% Naik/(Turun)
Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	Rp -	Rp -	-
Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru	Rp -	Rp -	-
Belanja Bantuan Imbal swadaya Sekolah/Lembaga	Rp -	Rp -	-
Belanja Bantuan Beasiswa	Rp -	Rp -	-
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	Rp -	Rp -	-
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp -	Rp -	-

Catatan Penting Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

<Laporan Realisasi Anggaran harus disertai informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan>

Contoh :

- Memberikan penjelasan apabila ada pemotongan anggaran atau keterlambatan penerimaan dokumen revisi.yang berdampak pada pelaksanaan dan atau pelaporan.
- Mencantumkan dan menjelaskan realisasi pendapatan hibah yang belum dicantumkan dalam DIPA baik berupa uang maupun barang, nomor rekening serta perlakuan terhadap sisa anggaran maupun jasa giro yang menampung dana hibah tersebut.

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

<Menjelaskan Posisi Neraca secara umum untuk Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per (tanggal periode laporan)>.

Komposisi Neraca per <tanggal periode laporan> adalah sebagai berikut :

Uraian	30 Juni/31 Desember 2XX1	30 Juni/31 Desember 2XX0	Kenaikan/ (penurunan)
Aset	Rp -	Rp -	Rp -
Kewajiban	Rp -	Rp -	Rp -
Ekuitas Dana	Rp -	Rp -	Rp -

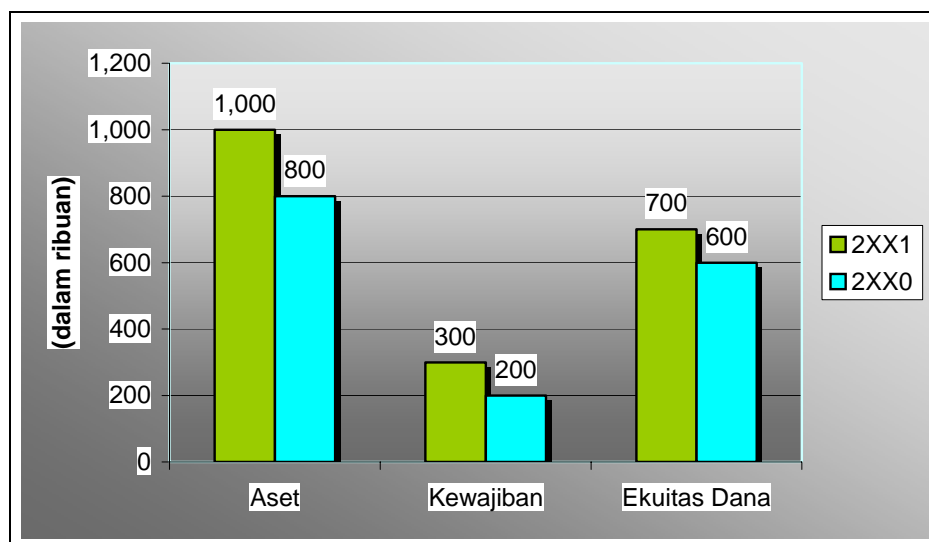
Jumlah Aset per <tanggal periode laporan> sebesar Rp... terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp... dan Aset Tetap sebesar Rp... Aset Lainnya sebesar Rp...

Jumlah Kewajiban per <tanggal periode laporan> sebesar Rp... merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp...

Jumlah ekuitas dana per <tanggal periode laporan> sebesar Rp... terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp... dan ekuitas dana investasi sebesar Rp...

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini

Grafik. Komposisi Neraca



Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

*Kas di Bendahara
 Pengeluaran Rp...
 dan
 Kas di Bendahara
 Penerima Rp...*

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

<Menjelaskan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2XX1 juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu>.

(Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per <tanggal periode laporan> sebesar Rp... Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per wilayah adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian Wilayah	30 Juni/31 Desember 2XX1	30 Juni/31 Desember 2XX0
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
	Total	Rp -	Rp -

<Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per-satuan kerja dapat dilampirkan dalam lampiran laporan keuangan. Lampiran tersebut memuat jumlah saldo, nomor rekening Bendahara Pengeluaran, dan nilai penyetoran pada tahun 2XX2 dengan menyebutkan tanggal dan nomor dari dokumen bukti penyetoran>.

<Jelaskan jika dalam rekening Bendahara Pengeluaran terdapat saldo yang bukan berasal dari UP, nilai tersebut bukan merupakan bagian dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam neraca>.

Contoh :

<Dalam rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank ... terdapat saldo sebesar Rp... yang bukan merupakan saldo dari **akun Kas di Bendahara Pengeluaran**, yang terdiri dari:>

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	Rp -
2	Gaji bulan Januari 2XX2 yang belum dibayarkan	Rp -
3		Rp -
	Jumlah	Rp -

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

<Menjelaskan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2XX1 juga dibandingkan antara TA sekarang dengan TA yang lalu>.

(Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara.)

Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per <tanggal periode laporan> Rp... Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per wilayah adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian Wilayah	30 Juni/31 Desember 2XX1	30 Juni/31 Desember 2XX0
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -
	Total	Rp -	Rp -

(Daftar Saldo Kas Bendahara Penerimaan per-satuan kerja dapat dilampirkan dalam lampiran laporan keuangan. Lampiran tersebut memuat kode MA Penerimaan, uraian MA penerimaan, jumlah saldo, nomor rekening Bendahara Penerimaan, dan nilai penyeteroran pada tahun 2XX2.)

Piutang Pajak Rp...

C.2.1.3 Piutang Pajak (khusus Departemen Keuangan)

<Mencantumkan berapa jumlah Piutang Pajak secara total per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, buat daftar secara rinci untuk menjelaskan piutang pajak per satker per 31 Desember 2XX1 dilampirkan>

Piutang Bukan Pajak Rp...

C.2.1.4 Piutang Bukan Pajak

<Mencantumkan berapa jumlah Piutang Bukan Pajak secara total per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, buat daftar secara rinci untuk menjelaskan piutang bukan pajak per satker per 31 Desember 2XX1 dilampirkan>

BL TPA Rp...

C.2.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

<Mencantumkan berapa Tagihan Penjualan Angsuran secara total per >

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

<tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, daftar rincian per 31 Desember 2XX1 dapat dilampirkan>.

BL TGR Rp...

C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

<Mencantumkan berapa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi secara total per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, Daftar rincian per 31 Desember 2XX1 dilampirkan>.

Piutang Lain-lain Rp...

C.2.1.7 Piutang Lain-lain

<Mencantumkan berapa piutang lainnya secara total per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, Daftar Rincian per 31 Desember 2XX1 dilampirkan>.

Persediaan Rp...

C.2.1.8 Persediaan

<Mencantumkan berapa nilai persediaan secara total per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya>.

Aset Tetap Rp...

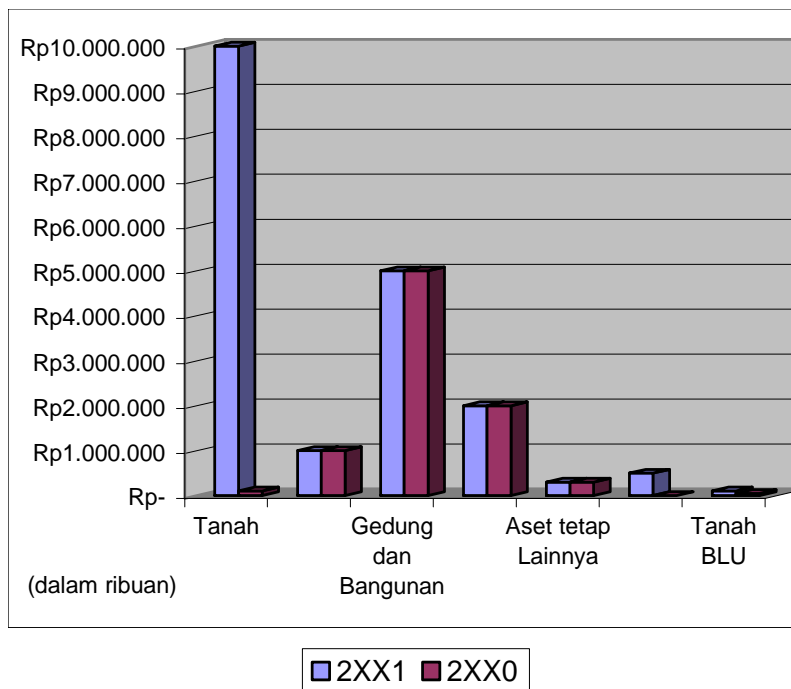
C.2.2. Aset Tetap

<Mencantumkan nilai aset tetap per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, Perbandingan Rincian menurut Jenis Aset Tetap, disajikan perbandingan aset dengan grafik, dijelaskan secara umum penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan Aset serta penjelasan perolehan aset dibandingkan dengan belanja modalnya, dijelaskan juga perolehan aset yang bukan dari belanja modal>.

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	per 30 Juni/ 31 Desember 2XX1	per 30 Juni / 31 Desember 2XX0	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	Rp -
3	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -	Rp -
5		Rp -	Rp -	Rp -
6	Tanah BLU	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -	0%

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)



<posisi aset tetap dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik>

C.2.2.1 Tanah

<Mencantumkan nilai tanah per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, jelaskan secara rinci penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan Aset serta penjelasan perolehan/perubahan aset dibandingkan dengan belanja modalnya>.

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

<Mencantumkan nilai peralatan dan mesin per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, jelaskan secara rinci penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan Aset serta penjelasan perolehan/perubahan aset dibandingkan dengan belanja modalnya>.

Contoh ilustrasi :

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

30 Juni 20X1	31 Desember 20X0	Kenaikan / (penurunan)
Rp50.000.000	Rp5.000.000	Rp45.000.000

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin sebesar Rp.45.000.000,- tersebut

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

adalah sbb:

Penambahan :		
Saldo Awal	Rp	3.000.000
Pembelian	Rp	45.000.000
Transfer Masuk	Rp	10.000.000
Pengembangan	Rp	2.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	3.000.000
	Rp	63.000.000
Pengurangan		
Transfer Keluar	Rp	5.000.000
Reklasifikasi Keluar	Rp	3.000.000
Koreksi Nilai	Rp	10.000.000
	Rp	18.000.000
Jumlah	Rp	45.000.000

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 30 Juni 2XX1 adalah sebagai berikut:

MA	Uraian	Jumlah
532111	BM Peralatan dan Mesin	Rp 45.000.000
535129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dikapitalisasi (Belanja Modal untuk Pengembangan Peralatan dan Mesin)	Rp 2.000.000
	Jumlah Belanja	Rp 47.000.000

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi pembelian dan pengembangan sebesar Rp.47.000.000,-

Contoh sebagaimana ilustrasi di atas, tidak hanya digunakan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada akun peralatan dan mesin namun juga digunakan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada akun neraca yang lain dari SIMAK BMN.

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

<Mencantumkan nilai gedung dan bangunan per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, jelaskan secara rinci penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan Aset serta penjelasan perolehan/perubahan aset dibandingkan dengan belanja modalnya>

C.2.2.4 Jalan dan Jembatan

<Mencantumkan nilai jalan dan jembatan per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, jelaskan secara rinci penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan Aset serta penjelasan perolehan/perubahan aset dibandingkan dengan belanja modalnya>.

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

C.2.2.5 Irigasi dan Jaringan

<Mencantumkan nilai irigasi dan jaringan per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, jelaskan secara rinci penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan Aset serta penjelasan perolehan/perubahan aset dibandingkan dengan belanja modalnya>

C.2.2.6 Aset Tetap Lainnya

<Mencantumkan nilai aset tetap lainnya per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, jelaskan secara rinci penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan Aset serta penjelasan perolehan/perubahan aset dibandingkan dengan belanja modalnya>.

C.2.2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan

<Mencantumkan nilai konstruksi dalam pengerjaan per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, jelaskan secara rinci penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan Aset serta penjelasan perolehan/perubahan aset dibandingkan dengan belanja modalnya>.

Aset Lainnya Rp...

C.2.3. Aset Lainnya

<Mencantumkan nilai aset lainnya per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, Perbandingan rincian menurut jenis aset lainnya disajikan dengan tabel, serta dijelaskan secara rinci mengenai aset lainnya>

C.2.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

<Mencantumkan nilai TPA per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, Penjelasan rincian mengenai TPA disajikan dengan tabel, daftar rincian mengenai TPA dilampirkan dalam lampiran>.

C.2.3.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

<Mencantumkan nilai Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penjelasan rincian mengenai TP/TGR disajikan dengan tabel, daftar rincian mengenai TP/TGR dilampirkan dalam lampiran>.

C.2.3.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

<Mencantumkan nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penjelasan rincian mengenai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga disajikan dengan tabel, daftar rincian mengenai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dilampirkan dalam lampiran>.

C.2.3.4 Aset Tak Berwujud

<Mencantumkan nilai Aset Tak Berwujud per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penjelasan rincian mengenai Aset Tak Berwujud disajikan dengan tabel, daftar

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

rincian mengenai Aset Tak Berwujud dilampirkan dalam lampiran>.

C.2.3..5 Aset Lain-lain

<Mencantumkan nilai Aset Lain-lain per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penjelasan rincian mengenai Aset Lain-lain disajikan dengan tabel, daftar rincian mengenai Aset Lain-lain dilampirkan dalam lampiran>.

Kewajiban Rp...

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN

<Mencantumkan nilai Uang Muka dari KPPN per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran>.

C.2.4.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan

<Mencantumkan nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Di Bendahara Penerimaan>.

*Ekuitas
Lancar Rp...*

Dana **C.2.5. Ekuitas Dana Lancar**

C.2.5.1 Cadangan Piutang

<Mencantumkan nilai Cadangan Piutang per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Piutang PNBPN, Bagian Lancar TPA, Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya, dijelaskan secara rinci masing-masing perkiraan>.

C.2.5.2 Cadangan Persediaan

<Mencantumkan nilai Cadangan Persediaan per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan>.

*Ekuitas
Diinvestasikan Rp...*

Dana **C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan**

C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

<Mencantumkan nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap>.

C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

<Mencantumkan nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per <tanggal periode laporan> dibandingkan dengan periode sebelumnya, perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Lainnya>.

*Catatan
Lainnya*

Penting **C.3 CATATAN PENTING LAINNYA**

<Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan neraca, misal Rekening-rekening yang dikelola Kementerian Negara, Aset-aset yang bermasalah, Neraca BLU apakah sudah diintegrasikan dengan neraca eselon I, Aset Eks Cina, Aset Bersejarah,

Laporan Keuangan Eselon I (nama Eselon I dan periode LK)

hambatan/kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan baik yang disebabkan masalah internal maupun eksternal, transaksi-transaksi yang belum /tidak dapat diinput dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Eselon I>.

*Pengungkapan
Penting Lainnya*

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

<Menjelaskan temuan-temuan BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan>.

Daftar temuan dan tindak lanjutnya dilampirkan sebagaimana format terlampir

D.2 REKENING PEMERINTAH

<Menjelaskan rekening pemerintah yang dimiliki kementerian negara/lembaga yang dipertahankan, ditutup dan lain-lain>.

Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir

D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

<Menjelaskan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan LRA dan Neraca namun mempengaruhi Laporan Keuangan, misalnya reorganisasi, force majeure, sengketa peradilan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Eselon I>.